

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ashri, M., 2018, *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. Cv. Social Politic Genius (Sign).
- Brian Thompson, 1997, *Textbook On Constitutional And Administrative Law*, London : Blackstone Press Ltd.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara).
- Delfina Gusman dan Yunita Syofyan, 2021, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Depok:Pt RajaGrafindo Persada.
- Faisal, S. 1990. *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan aplikasi*. Ya3.
- Hiariej, E. O. 2010. *Pengadilan atas beberapa kejahatan serius terhadap hak asasi manusia*. Erlangga.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung:Alfabeta.
- John Locke, *Two Treatise of Government*. 2003, Cambridge: Cambridge University Press
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M., 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenada Media.
- Josef M. Monteiro, *Lembaga-Lembaga Negara setelah Amandemen UUD 1945*, Cetakan Pertama, Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Kristanto, V. H., 2018, *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah:(KTI)*. Deepublish.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M., 2019, *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Majda El Muhtaj, 2017, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Prenada Media
- Milne, A. J. M., 1986, *Human rights and human diversity: an essay in the philosophy of human rights*. Sterling Publishing Company, Inc..
- Soemantri, S., 1987, *Prosedur dan sistem perubahan konstitusi*. Bandung: Alumni.

Sugiono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta).

Tenriawaru, S. H., MH, W. M. N. M., SH, M., Yanuar Adi Nugroho, S. H., & Baniara Mangapul Sinaga, S. H. *Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Dalam Upaya Penegakan Atas Pelanggaran HAM yang Berat pada UU No 27 Tahun 2004*. Penerbit Adab.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu.

C. Jurnal

Ahmad Husen, Eksistensi Peraturan Presiden Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Implikasi Yuridisnya terhadap Sistem Perundang-undangan di Indonesia, *Al-Ahkam*

Alimudin, D., 2022, *Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*. Lex Administratum.

Anthonyus P, D. R., 2022, *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Ekosida Sebagai Salah Satu Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia= An International Law Review On Ecocide As Human Rights Violation* (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).

Ardhani, W. W. A. W. W. *Kajian Yuridis Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Ham) Berat Di Masa Lalu Pasca Dihapusnya Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Di Indonesia*. Abstract Of Undergraduate Research, Faculty Of Law, Bung Hatta University.

- Ashady, S., & Dudy, A. A., 2023, Pemberian Amnesty Terhadap Pelaku Kejahatan Internasional Melalui, Proses Transitional Justice (Kajian Perbandingan Kasus Apartheid Di Afrika, Uruguay Dan G 30 S Di Indonesia. *Tirtayasa Journal Of International Law*.
- Cipto Prayitno, 2020, Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, *Jurnal Konstitusi*.
- Dany Tri Utama hutabarat, 2022, Pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Bernegara, *Jurnal Riset Pendidikan dan Pengajaran*.
- Erfandi, T., 2022, Tinjauan Yuridis dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Afrika Selatan dan Indonesia. "Dharmasisya" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*.
- Fadhil, M., 2020, Impunitas Dan Penerapan Keadilan Transisi: Suatu Dilema Penyelesaian Kasus Pelanggaran Ham Berat Di Masa Lalu. *Petitum*.
- Firmandiaz, V., & Husodo, J. A., 2020, Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Di Indonesia Oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ditinjau Dari Kewenangannya (Studi Kasus Timor-Timur). *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*.
- Hardianti, D., & Rahayu, J. S., 2016, Tanggung Jawab Negara Menyelesaikan Kasus Pelanggaran Berat Ham Masa Lalu Melalui Proses Rekonsiliasi Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*.
- Iqbal Aji Saputra, Salsabila Aprilia, 2023, Relevansi Konstitusi dalam Menjamin dan Menegakkan HAM (Hak Asasi Manusia) di Indonesia, *JRP : Jurnal Relasi Publik*.
- Irfani, S., & Muharam, R. S., 2022, Human Rights Justice in Kamisan Action in Indonesia. *Jurnal HAM*.
- Jonathan, K., Taslim, N. Y., & Dinata, C. M., 2022, Kasus Kerusuhan Tanjung Priok Tahun 1984 Sebagai Pelanggaran Ham Di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*.
- Nasution, A. R., 2018, Penyelesaian Kasus Pelanggaran Ham Berat Melalui Pengadilan Nasional Dan Internasional Serta Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi. *Jurnal Mercatoria*.

- Nasution, A. R., 2018, Penyelesaian Kasus Pelanggaran Ham Berat Melalui Pengadilan Nasional Dan Internasional Serta Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi. Jurnal Mercatoria.
- Papilaya, B. D. A., Peilouw, J. S. F., & Waas, R. M., 2021, Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Belarusia Ditinjau Dari Hukum Internasional. Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum.
- Rahmah, A., 2023, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Kemanusiaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora.
- Ramayanti, L & Suryaningsi, S, 2022, Analisis Anak Korban Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi. Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum.
- Riski, N., 2023, Pentingnya Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Kenegaraan. Mandalika Law Journal.
- Rosidah, A., 2017, Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Snowball Throwing Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran Ips. Jurnal Cakrawala Pendas.
- Sugiarto, K. Penerapan Asas Retroaktif Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia Application Of Retroactive Principle In The Law Number 39 Of 1999 Concerning On Human Rights And The Law Number 26 Of 2000 Concerning On Human Rights Court In Indonesian Legal System.
- Kejahatan Sujatmoko, A., 2007, Pengadilan Campuran ("Hybrid Tribunal") Sebagai Forum Penyelesaian Atas Internasional. Teras Law Review: Jurnal Hukum Humaniter Dan Ham
- T. Mulya Lubis, 1982, Hak Asasi Manusia Dan Kita, Jakarta : Pt Djaya Pirusa.
- Wijiasih, R. (2016). Prospek Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Dalam Tragedi Trisakti. Harmony: Jurnal Pembelajaran Ips Dan Pkn.
- Wongkar, V. A., 2006, Tanggung Jawab Komando Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Ham) Yang Berat Dan Kejahatan Perang Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia (Command Responsibility Towards The Gross Violation Of Human Rights And War Crimes In The Frame Work Of The

Reform Of Indonesian Penal Law) (Doctoral Dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).

D. Website

Ady Thea DA, “3 Catatan Imparsial Atas Terbitnya Keppres Presiden Tentang Penbentukan Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat”, <https://www.hukumonline.com>.

Fai, “Hak Asasi Manusia”, <https://umsu.ac.id/hak-asasi-manusia/>.

Habibullah Al Faruq, Bentuk Pelanggaran Ham (Hak Asasi Manusia), Diakses Dari www.habibullahurl.com.

Lala Nilawanti, Tugas dan Wewenang Presiden Menurut UUD 1945, [https://www.gramedia.com/best-seller/tugas-dan-wewenang-presiden-menurut-uud 1945/#3_Wewenang_Presiden](https://www.gramedia.com/best-seller/tugas-dan-wewenang-presiden-menurut-uud-1945/#3_Wewenang_Presiden).

Nafiatul Munawaroh, Perbedaan Kekuatan Hukum Keputusan Presiden dengan Peraturan Presiden, HukumOnline.com, https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-kekuatan-hukum-keputusan-presiden-dengan-peraturan-presiden-lt4ffce5b9240c9/#_ftn2.

Renata Christha, 8 Prinsip Dan Sifat Hak Asasi Manusia Beserta Penjelasanya, 8 Prinsip dan Sifat Hak Asasi Manusia Beserta Penjelasannya (hukumonline.com).Zulfikar, F., 2021, Hak Asasi Manusia: Pengertian, Macam-Macam, Dan Contoh Pelanggaran Ham. Detikedu. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5600613/hak-asasi-manusia-pengertian-macam-macam-dan-contoh-pelanggaran-ham>.

TEMPO, “Soal Pernyataan Kontroversial Yusril dan Surat Berkop Kemendes, Apa Tanggapan Mahfud MD?”, <https://www.tempo.co/politik/soal-pernyataan-kontroversial-yusril-dan-surat-berkop-kemendes-apa-tanggapan-mahfud-md--1096539>.

E. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Sultanul Arifin, S.Sos, M.H., Kepala Perwakilan Komnas
HAM RI Sumatera Barat, 7 Oktober 2024, “Penyelesaian Kasus Pelanggaran
HAM berat dimasa lalu secara Non-yudisial”

